

**JARINGAN KOMUNIKASI DALAM PENGELOLAAN DAN  
PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK  
(Studi Komunikasi Humas Pemerintah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah  
Di Kota Solok)**

**Oleh:**

**JHONI TRISNO**

**Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Provinsi Bengkulu**

**ABSTRACT**

*This study was conducted to describe the communication network in the management and provision of public information in Government Public Relations and Regional Work Unit (SKPD) in Solok City. The description of the communication network was obtained using descriptive qualitative research methods with data collection techniques of interview, observation and documentation. The communication network observed revolves around the functions of the communication network, connectivity, communication network typology, and separator of Solok City Public Relations Division and other Regional Work Units (SKPD). The results of the study illustrate that; 1) The function of the Government Public Relations communication network with other SKPD in the City of Solok as a technical person in charge of being able to manage the organization's internal communication. The Public Relations Department has provided information technology in the form of an application system in the form of integrated internet in each organizational unit, 2) Connectivity of the Public Relations Section of Solok City Regional Secretariat and other SKPD have strong and close connections because they use informal communication that prioritizes interpersonal closeness, the Public Relations and other SKPD departments in Solok City Government are running decentralized, 4) In the communication network of the Solok City Regional Secretariat and other SKPD, each member of each agency can communicate with each other, either directly or using media, such as telephones.*

**Keywords:** *communications network, public information, human government SKPD Solok City*

**PENDAHULUAN**

Hubungan Masyarakat (Humas) pada lembaga pemerintah, layaknya Humas atau *Public Relations* pada organisasi lain, baik komersial ataupun non komersial memiliki peran yang sangat strategis. Humas bertindak sebagai komunikator dari publik internal kepada publik eksternal ataupun sebaliknya. Humas menjadi ujung

tombak dalam sebuah organisasi atau lembaga dalam melakukan aktivitasnya di era keterbukaan informasi sekarang ini.

Melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, masyarakat dijamin haknya untuk memperoleh informasi dari lembaga pemerintah, sekaligus UU ini juga menuntut setiap lembaga yang

termasuk dalam kategori Badan Publik untuk dapat menyediakan dan menyebarluaskan informasi publik secara transparan kepada masyarakat. Adapun informasi publik yang harus disediakan dan diumumkan tersebut meliputi: 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, antara lain: a) Informasi yang berkaitan dengan badan publik; b) Informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait; c) Informasi mengenai laporan keuangan dan d) Informasi lain yang diatur dalam perundang undangan; 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, yaitu suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum; 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat, meliputi: a) Daftar seluruh informasi publik yang berada dibawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan; b) Hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya; c) Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya; d) Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan badan publik; e) Perjanjian badan publik dengan pihak ketiga; f) Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum; g) Prosedur kerja pegawai badan publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau h) Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur UU KIP.

Pemberlakuan UU KIP membuka implikasi yang sangat luas bagi lembaga kehumasan. Fungsi organisasi kehumasan yang selama ini dipahami mempunyai kecenderungan untuk kegiatan yang ditujukan hanya kepada orang-orang di luar organisasi (Effendy, 2011:132) atau untuk mengkomunikasikan kebijakan dan program kepada masyarakat sekaligus

memfasilitasi aspirasi masyarakat, tampaknya perlu lebih diperkaya. Humas pemerintah, sebagai aparat terdepan di bidang pelayanan informasi, perlu meningkatkan proses kinerja dan transmisi informasi dalam lingkup internal kelembagaan. Hal ini secara khusus terkait dengan bagaimana informasi yang tersedia pada setiap unit kerja organisasi selanjutnya dapat dijadikan dasar bagi proses pengambilan keputusan (Hartono dan Manihuruk, 2012:23).

Untuk dapat menghasilkan informasi yang akan dipublikasikan pada masyarakat, Humas pemerintah perlu melakukan komunikasi dengan seluruh unit organisasi yang ada pada lembaga yang diwakilinya, hal ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, yang secara tegas menyatakan bahwa Humas adalah juru bicara pemerintah, Humas berkewajiban menjalin hubungan kerja dan koordinasi antar lembaga dengan membangun hubungan koordinatif dan konsultatif antar unit atau satuan kerja, dan praktisi kehumasan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya.

Hubungan koordinatif dan konsultatif antara Humas pemerintah dengan unit kerja lainnya dalam organisasi sangat dibutuhkan, mengingat dalam hal penyebaran informasi terutama segi materi, Humas tidak dapat bekerja sendiri karena terkait banyak aspek dengan domain instansi teknis lainnya. Karena itu keterpaduan dan koordinasi antar satuan kerja mutlak ditingkatkan (Hartono dan Manihuruk, 2012:29). Kegagalan dalam melakukan komunikasi dalam bentuk koordinasi dan konsultasi di internal badan publik akan dapat menghambat

tersedianya informasi publik, sebagaimana hasil penelitian Indarto (2012) yang menunjukkan bahwa lemahnya komunikasi pemerintah di internal badan publik menjadi kendala dalam implementasi UU KIP.

Sebagai jembatan informasi, idealnya Humas pemerintah mampu menjalin komunikasi dengan seluruh unit kerja dalam organisasi agar bisa menghimpun, mengolah, menyediakan dan mempublikasikan semua informasi yang berhubungan dengan kegiatan dan program pemerintah. Karenanya menjalankan komunikasi internal menjadi fungsi utama lainnya bagi Humas pemerintah, walaupun komunikasi ini lazim dalam organisasi namun mengandung arti penting dalam pemerintahan karena dua alasan. Pertama, penyebaran informasi, pengumuman kebijakan ataupun tindakan lain organisasi dapat dilakukan segera. Kedua, untuk memberikan reaksi cepat terhadap rumor yang berkembang di luar organisasi yang dapat merusak citra pemerintah (Cutlip *et al.*, 2009:477-478).

Pada hakikatnya komunikasi dalam organisasi bertujuan untuk membagi informasi diantara seluruh aparatur organisasi dan juga sebagai tindakan koordinasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi organisasi (Liliweri, 2014:372-373). Lebih lanjut dikatakan komunikasi dalam organisasi menghubungkan individu-individu maupun kelompok-kelompok (satuan) kerja dalam sebuah sistem tertentu (Liliweri, 2014:380) dan diantara individu atau kelompok tersebut terjadi pertukaran pesan. Pertukaran pesan itu melalui suatu jalan tertentu yang dinamakan dengan jaringan komunikasi (Muhammad, 2009:102).

Berfungsinya jaringan komunikasi organisasi dan keterlibatan setiap anggota didalamnya dapat

mempengaruhi organisasi dalam mencapai tujuannya. Eisenberg, Monge dan Miller (1983) dalam Pace dan Faules (2013:212) menelaah hubungan antara keterlibatan dalam jaringan komunikasi dan komitmen organisasi. Mereka menyimpulkan bahwa keterlibatan anggota organisasi dalam jaringan komunikasi berpengaruh kuat terhadap komitmen organisasi. Para pekerja dapat memperoleh apa yang mereka cari dari organisasi melalui interaksi sosial dalam pekerjaan-pekerjaan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa penggiatan aktivitas organisasi dapat terjadi bilamana masing-masing anggota organisasi menjalankan komunikasi secara terkoordinasi. Jalannya suatu organisasi selalu didukung dengan adanya keterlibatan anggota terkait fungsi dan tugasnya dalam struktur organisasi melalui jaringan komunikasi. Berfungsinya jaringan komunikasi dalam organisasi, dapat mengatur aktivitas komunikasi para anggota organisasi yang akan membentuk alur informasi berdasarkan struktur dalam organisasi.

Berdasarkan persoalan di atas dan pentingnya jaringan komunikasi guna mendukung pertukaran pesan atau informasi antar satuan kerja dalam organisasi, mendasari penulis melakukan penelitian tentang bagaimana jaringan komunikasi dalam rangka pengelolaan dan penyediaan informasi publik dengan mengangkat judul Jaringan Komunikasi Dalam Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik (Studi Komunikasi Humas Pemerintah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Solok).

## **METODE PENELITIAN**

Berdasarkan pertimbangan jenis data yang dikumpulkan berupa informasi tentang bagaimana jaringan komunikasi Bagian Humas Sekretariat

Daerah Kota Solok dan SKPD lainnya dalam pengelolaan dan penyediaan informasi publik. Jenis penelitian kualitatif, peneliti anggap paling cocok untuk penelitian ini. Melalui penelitian kualitatif dapat mengungkap pemahaman dan tindakan yang dijalankan guna menjaga hubungan baik dan menjalin komunikasi diantara satuan kerja dalam organisasi. Sebagaimana Moleong (2013:6) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik.

Sesuai dengan analisis data dan tujuan penelitian, penelitian ini bersifat deskriptif, yakni jenis penelitian yang bertujuan membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan aktual tentang fakta-fakta dan sifat-sifat objek tertentu. Jenis penelitian ini untuk menggambarkan realitas yang sedang terjadi tanpa menjelaskan hubungan antar variabel (Kriyantono, 2009:67-68).

Menurut Ardial (2014:262), metode deskriptif dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai satu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah atau unit yang diteliti. Ciri-ciri pokok metode deskriptif antara lain, a) Memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan atau masalah-masalah yang bersifat aktual; b) Menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya, diiringi dengan interpretasi rasional. Secara singkat metode deskriptif merupakan langkah-langkah melakukan representasi objektif tentang gejala-gejala yang terdapat di dalam masalah yang diselidiki.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah penjelasan dari Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Solok mengenai jalannya jaringan komunikasi dengan SKPD yang difokuskan untuk menganalisis bagaimana dimensi jaringan (fungsi, keterhubungan, sentralitas/desentralitas dan Derajat Pemisahan) Humas Pemko Solok dengan SKPD lainnya.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Keseluruhan data yang peneliti peroleh dari hasil wawancara, pengamatan dan dokumentasi telah menunjukkan cukup banyak informasi yang diperoleh dan penting untuk diketahui sesuai dengan tujuan penelitian ini. Gambaran mengenai hasil analisis berdasarkan rumusan masalah penelitian dapat memberikan penjelasan tentang bagaimana jaringan komunikasi Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Solok dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya dalam rangka pengelolaan dan peyediaan informasi publik di lingkup internal organisasi pemerintah daerah kota solok.

Organisasi pada dasarnya merupakan komposisi sejumlah orang yang menduduki posisi atau peranan tertentu. Di antara orang-orang ini saling terjadi pertukaran pesan. Pertukaran pesan itu melalui jalan tertentu yang dinamakan jaringan komunikasi (Muhammad, 2009:102). Jaringan komunikasi (*communication networks*) dalam suatu organisasi merupakan proses bagaimana suatu pesan termasuk arus informasi dan instruksi yang disampaikan secara rinci, ditentukan oleh jenjang hierarki resmi organisasi untuk melaksanakan fungsi-fungsi pekerjaan (Ruliana, 2014:80).

Peranan individu dalam sistem komunikasi ditentukan oleh hubungan struktur antara satu individu dengan

individu lainnya dalam organisasi. Gagasan dasar yang sangat penting mengenai jaringan komunikasi adalah keterhubungan atau keterkaitan. Jaringan dalam kelompok (*group network*) terbentuk karena individu cenderung berkomunikasi lebih sering dengan anggota organisasi tertentu lainnya. Untuk dapat menganalisis jaringan komunikasi dalam suatu organisasi dapat dengan melihat beberapa dimensi yang terkait dengan keterhubungan berbagai individu dalam jaringan, di antaranya: Pertama, fungsi jaringan, hal ini merujuk pada bagaimana jalannya fungsi jaringan dalam organisasi; Kedua, tingkat keterhubungan, menggambarkan rasio antara hubungan yang sebenarnya dengan kemungkinan hubungan; Ketiga, Sentralitas/ Desentralitas, dikenal sebagai keterhubungan antara individu dan kelompok; Keempat, Derajat Pemisah, merupakan jumlah hubungan yang terdapat diantara individu yang berkomunikasi (Morissan, 2014:415).

## **Fungsi Jaringan Komunikasi Humas Pemerintah dengan SKPD Lainnya di Kota Solok**

### **1. Keteraturan Jaringan**

Keteraturan jaringan komunikasi dalam rangka penyediaan informasi di Pemerintahan Daerah Kota Solok, dilihat dari komunikasi dua arah secara timbal balik antara bagian Humas dan unit organisasi lainnya berupa kontrol yang dilakukan oleh bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Solok dalam menjaring berbagai informasi dari unit organisasi lainnya. Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Solok mempunyai tanggung jawab secara teknis untuk dapat mengelola komunikasi internal organisasi.

Bagian Humas Setdako Solok memiliki fungsi untuk membangun komunikasi internal organisasi dengan

unit-unit organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya yang secara teknis menjalankan program dan kegiatan pemerintah dalam beragam bidang yang hasilnya perlu untuk diketahui oleh publik. Berfungsinya jaringan komunikasi antara bagian Humas Setdako Solok dengan seluruh SKPD yang ada di jajaran pemerintah daerah Kota Solok diharapkan akan dapat menjaring seluruh informasi yang menyangkut perkembangan dan kinerja pemerintah yang kemudian akan dipublikasikan pada masyarakat.

Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Solok belum menjalankan fungsinya dalam mengontrol arus informasi dalam organisasi. Aktifitas komunikasi bagian Humas dan unit-unit organisasi lainnya masih sebatas pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara langsung oleh pimpinan daerah. Sementara Informasi kegiatan yang berasal dari unit organisasi lainnya, bagian Humas melakukan kontrol pada saat kegiatan yang dilaksanakan oleh unit organisasi mengalami suatu kasus yang menyita perhatian masyarakat sehingga perlu untuk diklarifikasi. Inisiatif bagian Humas tersebut berupa identifikasi isu atau informasi dari media terkait berita tentang kegiatan suatu SKPD, kemudian bagian Humas bertindak sebagai fasilitator yang menghubungkan SKPD dengan pihak media untuk klarifikasi kegiatan yang dilaksanakan hingga dapat dipublikasikan. Selain itu bagian Humas juga melakukan identifikasi langsung ke SKPD terkait suatu isu, kemudian meminta keterangan kepada SKPD terkait dan merilis berita di media massa.

Program dan kegiatan yang dijalankan oleh unit organisasi memang bukan dikerjakan langsung oleh pimpinan daerah akan tetapi merupakan tanggung jawab pimpinan daerah mulai

dari perencanaan, pelaksanaan sampai hasil dari kegiatan tersebut. Masyarakat berhak untuk mengetahui semua proses pelaksanaan kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Terbatasnya kontrol bagian Humas untuk menghimpun, menyediakan dan mempublikasikan informasi hanya pada kegiatan pimpinan daerah, karena hal ini telah diatur melalui surat edaran Walikota Solok Nomor 019/688/Humas-2014 perihal Tertib protokoler, publikasi dan Dokumentasi Kegiatan Kepala Daerah. Sementara untuk informasi diluar kegiatan pimpinan daerah belum ada aturan khusus yang mengatur, sehingga informasi yang terekspos ke masyarakat hanya sebatas kegiatan pimpinan daerah.

## **2. Temuan-Temuan/Inovatif Jaringan**

Faktor lain yang menentukan berjalannya fungsi jaringan komunikasi adalah adanya temuan-temuan atau inovatif jaringan. Berupa adaptasi anggota organisasi terhadap pengaruh internal dan eksternal (Yasin, 2012). Dalam hal penyediaan informasi publik, UU KIP dan aturan lain yang mengatur penyebaran informasi publik merupakan hal yang perlu diadaptasi oleh seluruh anggota organisasi di Pemerintah Kota Solok agar dapat mengimplementasikan amanat UU tersebut.

Anggota organisasi di lingkup organisasi pemerintah daerah kota solok belum mengadaptasi dengan tepat apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan aturan lain yang mendukung pelaksanaan UU tersebut. Bagian Humas Setdako Solok belum memahami perannya sebagai penyedia informasi publik. Terlambatnya proses

penyediaan informasi publik di Kota Solok menurut praktisi Humas salah satunya disebabkan karena baru dibentuknya PPID dan belum berjalan maksimal. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam pasal 21 ayat 2 telah mengatur bahwa, dalam hal PPID belum ditunjuk, tugas dan tanggung jawab PPID dapat dilakukan oleh unit atau dinas di bidang informasi, komunikasi, dan/atau kehumasan. Salah satu bukti bagian Humas belum mengadaptasi dengan tepat apa yang diamanatkan PP No.61 Tahun 2010.

Belum adanya sosialisasi Undang-Undang No 14 Tahun 2008 dan aturan lain yang mendukung pelaksanaan UU KIP di lingkup pemerintah daerah Kota Solok mengakibatkan anggota organisasi belum memahami peran masing-masing dalam proses pengelolaan dan penyediaan informasi publik. Unit organisasi belum mengetahui kewajiban mereka untuk dapat memberikan data atau informasi kegiatan yang dilaksanakan kepada Walikota melalui bagian Humas Setdako Solok seperti amanat Permendagri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Untuk meningkatkan kualitas komunikasi dan informasi di internal organisasi, bagian Humas telah menyediakan teknologi informasi berupa sistem aplikasi dalam bentuk internet terintegrasi di setiap unit organisasi. Namun pemanfaatan masih terbatas pada data atau informasi keuangan, belum dimanfaatkan untuk saling berbagi informasi pelaksanaan kegiatan dan program instansi masing

masing. Sarana yang telah tersedia belum dimanfaatkan secara optimal untuk berbagi informasi antar SKPD.

### **3. Keutuhan Integratif atau Pemeliharaan Jaringan**

Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Solok menyadari bahwa bagian Humas memiliki tugas pokok dan fungsi untuk sosialisasi, publikasi dan dokumentasi kegiatan pemerintahan. Fungsi yang tidak dimiliki oleh SKPD lainnya. Dan untuk dapat menyebarluaskan informasi mengenai seluruh kegiatan pemerintah perlu adanya komunikasi timbal balik antara bagian Humas dan unit organisasi lainnya.

Perlunya koordinasi dalam bentuk komunikasi timbal balik juga menjadi kebutuhan unit organisasi lainnya guna mendukung jalannya kegiatan di instansi masing-masing. Koordinasi antara Humas dan SKPD lainnya diperlukan dalam penyediaan informasi agar informasi yang dipublikasikan berasal dari satu sumber. Namun demikian, koordinasi bagian Humas dan unit organisasi lainnya dalam proses penyediaan informasi publik belum terlaksana secara maksimal karena belum didukung oleh suatu mekanisme yang dapat mengatur lalu lintas informasi dalam organisasi.

Liliweri (2014:48) menyebut hubungan kerja sama seperti ini sebagai perilaku *compliance (following rules)*, yakni perilaku kerja sama mengikuti peraturan yang telah ditetapkan organisasi. Karena belum adanya mekanisme atau aturan yang mengatur koordinasi dalam proses penyediaan informasi, maka hal ini belum dilaksanakan oleh bagian Humas dan SKPD lainnya.

### **4. Jaringan Informatif-Instruktif**

Jaringan komunikasi antar bagian Humas dan SKPD lainnya dalam rangka penyediaan informasi publik belum berjalan secara informatif-instruktif. Bagian Humas belum menjalankan perannya sebagai sumber informasi bagi unit organisasi lainnya. Sehingga SKPD tidak mengetahui kewajiban mereka untuk dapat menyediakan, melaporkan dan memberikan informasi program dan kegiatan secara rutin kepada walikota melalui bagian Humas, seperti yang diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Terkait penyampaian informasi kegiatan melalui bagian Humas ini, Belum adanya komunikasi yang bersifat informasi dan instruksi dari bagian Humas untuk menghimpun setiap informasi kegiatan unit organisasi ke bagian Humas mengakibatkan belum maksimalnya ketersediaan informasi publik di pemerintahan Kota Solok.

### **Keterhubungan Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Solok dan SKPD Lainnya**

Jaringan komunikasi bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Solok dan SKPD lainnya memiliki keterhubungan yang kuat dan dekat. Dalam berkomunikasi bagian Humas dan SKPD lainnya sering menggunakan komunikasi informal yang mengutamakan kedekatan secara antarpersonal. Hubungan antarpersonal yang baik dapat memudahkan dan melancarkan komunikasi antara bagian Humas dan unit organisasi lainnya. Komunikasi sering dilakukan secara lisan melalui media telepon dan Kabag Humas sangat terbuka dan mempunyai hubungan yang baik dengan setiap kepala SKPD. Hal ini memberikan

kemudahan bagi setiap unit organisasi untuk berkomunikasi dengan bagian Humas. Sesuai dengan pendapat Pace dan Faules (2013:203) yang mengatakan bahwa hubungan antarpersonal memiliki pengaruh yang besar. Hubungan antarpersona yang baik akan mendapatkan respon-respon positif.

### **Tipologi Jaringan Komunikasi Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Solok dan SKPD lainnya**

Jaringan komunikasi bagian Humas dan SKPD lainnya di Pemerintahan Kota Solok berjalan secara desentralisasi. Bagian Humas telah diberi kewenangan penuh oleh pimpinan untuk melaksanakan fungsi komunikasi baik internal maupun eksternal, yang telah melekat dalam tugas pokok dan fungsi bagian Humas.

Menurut asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Solok, Syaiful, bagian Humas diberi kewenangan untuk dapat menentukan informasi yang akan dipublikasikan, karena bagian Humas telah memahami apa saja yang harus disebarluaskan pada masyarakat, dan bila memerlukan masukan bagian Humas dapat berkoordinasi pada pimpinan.

Untuk melakukan koordinasi dan berhubungan satu sama lain antara bagian Humas dan unit organisasi lain, juga tidak terbatas dari level pimpinan saja, semua anggota diberi kesempatan untuk saling berkomunikasi, seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Solok, Edy Martin bahwa koordinasi dengan bagian Humas bukan hanya terbatas pada level seselon III saja, namun seluruh anggota dapat melakukan koordinasi dengan bagian Humas, yang harus diperhatikan adalah tetap menjaga hubungan baik. Hubungan baik merupakan kunci

keberhasilan komunikasi dalam organisasi. Berfungsinya seluruh unit-unit organisasi terletak pada tangan manusia. Karena itu seluruh anggota organisasi perlu terlibat dalam unit kerjanya masing-masing guna menjaga kelancaran organisasi dalam mencapai tujuan.

### **Hubungan Pemisah Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Solok dan SKPD lainnya**

Morissan (2013:416) menyatakan bahwa kualitas jaringan komunikasi dapat dipengaruhi oleh adanya derajat pemisah, yakni jumlah hubungan yang dibutuhkan untuk dapat menemui orang yang menjadi tujuan komunikasi. Dalam jaringan komunikasi bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Solok dan SKPD lainnya, tidak terdapat hubungan lain yang harus dilalui. Setiap anggota dari masing-masing instansi dapat saling berkomunikasi, baik secara langsung ataupun menggunakan media, seperti telepon. Keadaan ini menjadikan komunikasi antara bagian Humas dan SKPD lainnya menjadi lebih cepat dan menghindari distorsi pesan. Seperti yang disampaikan oleh Muhammad (2009:220), makin banyak mata rantai yang dilalui oleh pesan makin memungkinkan pesan itu disalahartikan.

### **PENUTUP**

Keseluruhan data yang peneliti peroleh dari hasil wawancara, pengamatan dan dokumentasi telah menunjukkan cukup banyak informasi yang diperoleh dan penting untuk diketahui sesuai dengan tujuan penelitian ini. Keteraturan jaringan komunikasi dalam rangka penyediaan informasi di Pemerintahan Daerah Kota Solok, dilihat dari komunikasi dua arah secara timbal balik antara bagian Humas dan unit organisasi lainnya

berupa kontrol yang dilakukan oleh bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Solok dalam menjangkau berbagai informasi dari unit organisasi lainnya. Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Solok mempunyai tanggung jawab secara teknis untuk dapat mengelola komunikasi internal organisasi.

Kontrol yang dilakukan oleh bagian Humas Setdako Solok dalam rangka mengelola informasi publik di internal organisasi belum terlaksana dengan maksimal, komunikasi bagian Humas dan SKPD lainnya berlangsung sebatas keperluan yang melibatkan pimpinan daerah. komunikasi yang terjalin dengan Humas adalah kegiatan-kegiatan yang meminta kehadiran walikota dan pimpinan daerah lainnya dalam rangka acara yang bersifat seremonial seperti, pencahangan atau peresmian yang membutuhkan bantuan keprotokoleran dari bagian Humas.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa anggota organisasi pemerintah daerah Kota Solok belum mengadaptasi secara tepat Undang-Undang No.14 Tahun 2008 dan aturan lain yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik. Baik bagian Humas ataupun anggota lainnya belum memahami apa yang diamanatkan oleh UU KIP dan aturan lain yang mendukung pelaksanaan UU tersebut. Hal ini tercermin dari pendapat praktisi Humas mengenai alasan belum tersedianya informasi publik di lingkup Pemerintah Daerah Kota Solok.

Terkait penyediaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Solok, bagian Humas Setdako Solok sebagai komunikator pemerintah memahami perannya untuk dapat berbagi informasi kepada masyarakat dan salah satu jalan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi kegiatan dan program pemerintah adalah melakukan

koordinasi dengan seluruh unit-unit organisasi.

Jaringan komunikasi antara bagian Humas dan unit organisasi lainnya berjalan secara informatif-instruktif saat bagian Humas membutuhkan informasi dari unit organisasi lainnya terkait suatu kegiatan yang akan dipublikasikan. Seperti yang disampaikan oleh para praktisi Humas, jika bagian Humas memerlukan suatu informasi dari SKPD lainnya terkait kegiatan yang dilaksanakan, bagian Humas langsung menghubungi SKPD bersangkutan dan selalu menjelaskan kegunaan informasi yang dibutuhkan serta memberikan arahan dan penjelasan tentang informasi-informasi yang diperlukan.

Komunikasi yang berjalan antara bagian Humas Setdako Solok dan unit organisasi lain, sejauh ini lebih banyak menggunakan komunikasi informal. Komunikasi tidak lagi memandang jabatan dalam struktur organisasi. Komunikasi informal dianggap akan dapat memperlancar proses pertukaran pesan, karena pesan dapat langsung disampaikan tanpa mengikuti aturan birokrasi yang mengikat, sehingga pengirim bisa langsung mendapatkan *feedback* dari penerima. Walaupun demikian, komunikasi formal secara tertulis tidak dapat diabaikan, karena menjadi dasar dari sebuah pertanggungjawaban kegiatan. Bagian Humas membuka pintu yang selebar-lebarnya kepada unit organisasi yang ingin berkoordinasi dengan membuka jalur untuk berkomunikasi secara informal.

Jaringan komunikasi antara bagian Humas dan unit organisasi lainnya, bersifat desentralitas. Bagian Humas telah diberi kewenangan untuk dapat menjalin komunikasi dengan seluruh unit organisasi yang ada di jajaran Pemko Solok sesuai dengan tupoksi

yang telah diamanatkan. Dalam jaringan komunikasi antara bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Solok dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya, komunikasi dapat dilakukan secara langsung tanpa harus melalui hubungan dengan individu ataupun kelompok lainnya. Setiap anggota dari unit organisasi lainnya dapat langsung berkomunikasi dengan bagian Humas dengan memanfaatkan semua media yang adabegitu juga sebaliknya praktisi Humas juga dapat langsung melakukan komunikasi dengan semua unit organisasi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Jakarta, Rajawali Pers
- Adji, Y. I. 2013. *Pola Komunikasi Komunitas Muter Film Dalam Media Sosial Twitter Untuk Meningkatkan Eksistensi*. Jakarta, Fakultas Ilmu Komunikasi. Universitas Mercu Buana. Skripsi
- Ardial. 2014. *Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi*. Cetakan Pertama. Jakarta, Bumi Aksara
- Ardianto, E. 2011. *Metodologi Penelitian Untuk Public Relations: Kuantitatif dan Kualitatif*. Cetakan Kedua. Bandung, Simbiosis Rekatama Media.
- Cutlip, S.,M. A.M. Center dan G.M. Broom. 2009. *Effective Public Relations*. Edisi Kesembilan Jakarta, Kencana
- Effendy, O.U. 2011. *Ilmu Komunikasi: Teori Dan Praktek*. Bandung, PT.Remaja Rosdakarya.
- Eriyanto. 2008. *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. PT. LKiS Yogyakarta, Pelangi Aksara
- Hartono, Y dan A. S. Manihuruk. 2012. *Kompetensi Kehumasan Pemerintah Dalam Mengantisipasi Penerapan Keterbukaan Informasi Publik*. Jurnal Penelitian Komunikasi, Informatika dan Media Massa-PEKOMMAS 15(1):23-29
- Indarto, M.J. 2012. *Manajemen Komunikasi Pemerintah Dalam Kebijakan Transparansi Informasi (Studi Evaluasi Komunikasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Kementerian Komunikasi dan Informatika)*. Jakarta, Program studi Ilmu Komunikasi. Universitas Indonesia. Tesis
- Kriyantono, R. 2009. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Edisi Pertama. Cetakan Keempat. Jakarta, Kencana
- Liliweri. A. 2014. *Sosiologi dan Komunikasi Organisasi*. Cetakan Pertama. Jakarta, Bumi Aksara
- Moleong, L.J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung, Remaja Rosdakarya
- Morissan. 2013. *Teori Komunikasi Individu Hingga Massa*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Jakarta, Kencana
- Morissan dan A. C. Wardhany. 2009. *Teori Komunikasi*. Cetakan Pertama. Jakarta, Ghalia Indonesia
- Muhammad, A. 2009. *Komunikasi Organisasi*. Edisi Pertama. Cetakan kesebelas. Jakarta, Bumi Aksara
- Pace, R. Wayne, dan Faules, D.F. 2013. *Komunikasi Organisasi: Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan*. Cetakan kedelapan. Bandung Remaja Rosdakarya
- Rahmadi, F. 1994. *Public Relations dalam Teori dan Praktek*. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama

- Ruliana. P. 2014. *Komunikasi Organisasi: Teori Dan Studi Kasus*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada.
- Ruslan, R. 2012. *Manajemen Public Relations & Media Komunikasi: Konsep dan Aplikasi*. Cetakan kesebelas. Jakarta, Rajagrafindo Persada.
- Sari. B.W.N. 2012. *Humas Pemerintah*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Yogyakarta, Graha Ilmu
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung
- Yasin, S. 2012. *Pengertian Komunikasi Organisasi*.  
<http://www.sarjanaku.com.29>  
Januari 2015 (21:00).
- Welkinson, D. 2012. *Peran Humas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Jakarta, Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Skripsi
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 *Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan Di Lingkungan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah*. 7 Maret 2011. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 131. Jakarta.
- Peraturan Menteri Pandayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 28 Tahun 2011 *Pedoman Umum Komunikasi Organisasi di Lingkungan Instansi Pemerintah*. 10 Mei 2011. Jakarta.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 *Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan Di Lingkungan Instansi Pemerintah*. 10 Mei 2011. Jakarta.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2011 *Pedoman Umum Infrastruktur Hubungan Masyarakat Di Lingkungan Instansi Pemerintah*. 10 Mei 2011. Jakarta.

### **Peraturan Perundangan**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Taun 2008 *Keterbukaan Informasi Publik*. 30 April 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*. 23 Agustus 2010. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99. Jakarta.

### **Sumber Lain**

- Interface.or.id. 2014. *Kajian Akses Warga Atas Informasi Anggaran*. <http://interface.or.id>. 7 Oktober 2014 (20:35)